



PEMERINTAHAN KOTA SERANG

**LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan karunianya kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan kemasyarakatan. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar MUHAMMAD Saw. Beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu konsisten terhadap ajarannya, Amin

Pada prinsipnya rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2022 ini menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, evaluasi kinerja tahun lalu, strategi kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran. Strategi kebijakan program dan indikasi kegiatan adalah untuk mendukung proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang pada khususnya serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju kota peradaban yang berdaya dan berbudaya.



Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional yang dalam satu materinya mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP daerah, RPJM daerah dan Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahun.

Serang, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SERANG



DIAT HERMAWAN, S.ST, M.Si

NIP. 19760426 200112 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	19
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	22
<i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang</i>	3



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Serang tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan



pembangunan melalui musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rencana kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang sebagai organisasi perangkat daerah pada tahun 2022 ini menyusun rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Serang tahun anggaran 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Serang tahun 2022 seperti yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Serang tahun 2018 – 2023 yaitu :

"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"

Pada MISI KEDUA (2) yaitu : **MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dalam operasionalnya akan mengacu kepada rencana strategis dan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya dengan memperhatikan kekuatan dan



kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Penanggulangan Bencana dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah.

Rencana kerja (Renja) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Serang tahun 2022 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan didaerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai landasan pembangunan tahunan Kota Serang, dan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar Kelurahan, Kecamatan, OPD serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2022 adalah sebagai berikut :



1. Terwujudnya penjabaran rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kota Serang tahun 2022
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar kelurahan, Kecamatan, sector dan antar fungsi disemua tingkatan pemerintahan
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan , penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan rencana kerja agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat data dan informasi tentang evaluasi pelaksanaan renja, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tentang talaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja dan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun kedepan tentu harus adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu/tahun sesudahnya, evaluasi dimaksud sebagai gambaran atau parameter untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dalam menentukan kebijakan tahun kedepan dalam penanggulangan bencana BPBD tidak salah arah dan sasaran. Adapun rekapitulasi dari review program dan kegiatan tahun lalu adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
BEKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN BENTUK BPPDS DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR BPPDS 1/3 TAHUN 2022 KOTA SENANG

KODE BUDIDAYA	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARHET KINERJA LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN (BENTUK BPPDS) TAHUN 2022-2023	RENCANA TARGET	TARGET DAN PENCAPAIAN PERIODE PROGRAM (GAK BERSAMA HASIL PROGRAM DAN PELAKSANAAN)				JUMLAH PROGRAM DAN PELAKSANAAN BPPDS 1/3 TAHUN 2022	PENCAPAIAN MELAKSANAAN TARGET BENTUK BPPDS (1/3 TAHUN 2022)	
						TARGET BENTUK BPPDS 1/3 TAHUN 2022	RENCANA HASIL BPPDS 1/3 TAHUN 2022	RENCANA HASIL BPPDS 1/3 TAHUN 2022	RENCANA HASIL BPPDS 1/3 TAHUN 2022			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.03.2.01.01	Pelaksanaan Informasi Bermanfaat Masyarakat/Kota	Persentase Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Informasi Bermanfaat di Kota Senang Persentase jumlah informasi bermanfaat yang diterima masyarakat/kota senang Jumlah kunjungan masyarakat/kota senang ke lokasi layanan terpadu Pelayanan masyarakat/kota senang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.01.01	Pelayanan Masyarakat Bermanfaat Masyarakat / Kota	Realisasi kegiatan layanan terpadu perantara Jumlah kunjungan masyarakat/kota senang ke lokasi layanan terpadu Pelayanan masyarakat/kota senang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100
1.05.03.2.01.01	Pelayanan Masyarakat Bermanfaat Masyarakat / Kota	Persentase kegiatan terpadu masyarakat yang datang ke lokasi layanan terpadu Jumlah kunjungan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	100
1.05.03.2.01.01	Pelayanan Masyarakat Bermanfaat Masyarakat / Kota	Persentase kegiatan terpadu masyarakat yang datang ke lokasi layanan terpadu Jumlah kunjungan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pengolahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pelatihan / Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pengolahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pelatihan / Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah orang dan persentase penduduk penduduk yang terdapat di lokasi layanan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	100
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah orang dan persentase penduduk penduduk yang terdapat di lokasi layanan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah orang dan persentase penduduk penduduk yang terdapat di lokasi layanan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah orang dan persentase penduduk penduduk yang terdapat di lokasi layanan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah orang dan persentase penduduk penduduk yang terdapat di lokasi layanan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	100
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah orang dan persentase penduduk penduduk yang terdapat di lokasi layanan terpadu Jumlah pelayanan terpadu	TMC	11	11	11	11	11	11	11	11	100
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Daya Saing Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Daya Saing Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Daya Saing Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05.03.2.03.01	Prosedur Operasi dan Prosedur Sistem Penunjang Keterampilan Masyarakat Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Daya Saing Masyarakat	TMC	11	11	11	11	11	11	11	11	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.09.01.2.01.01	Penelitian, percobaan dan Evaluasi Keberhasilan Substansi/ Kota	Jumlah kunjungan SDM, tempat dan jumlah dalam	Bulan	12	-	12	1	1	12	100	100	100	100	100	100
1.09.01.2.01.02	Proyek dan kegiatan penelitian dan Evaluasi Keberhasilan Kabupaten / Kota	Servis publik seperti untuk layanan kesehatan	jabar	100	7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.09.03.2.04.01	Program Sistem Diner Pengabdian Masyarakat	Program sistem kesehatan dan kegiatan dalam pengabdian masyarakat	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.09.03.2.04.02	Program Sistem Diner Pengabdian Masyarakat Kabupaten / Kota	Aktivitas pemerintah yang dibuat dalam rangka pengabdian masyarakat	Dokumen	0	1	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
1.09.03.2.04.03	Program Kolaborasi Bersama Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama	Kelompok	4	7	4	4	4	4	100	100	4	4	100	100
1.09.03.2.04.04	Kegiatan atau layanan dan Kampanye dalam Pengabdian Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
2	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Diner		%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.10	Sistem Penanggulangan Bencana				1					100					100
3.10.01	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.10.01.2.01	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.10.01.2.01.01	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	7	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.02	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.03	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	2	1	2	2	2	2	100	100	2	2	100	100
3.10.01.2.01.04	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Indikator	12	-	12	12	12	12	100	100	12	12	100	100
3.10.01.2.01.05	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.06	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.07	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.08	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	12	-	12	12	12	12	100	100	12	12	100	100
3.10.01.2.01.09	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.10	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	12	-	12	12	12	12	100	100	12	12	100	100
3.10.01.2.01.11	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.12	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.13	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	12	-	12	12	12	12	100	100	12	12	100	100
3.10.01.2.01.14	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.15	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	12	-	12	12	12	12	100	100	12	12	100	100
3.10.01.2.01.16	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.17	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	1	-	1	1	1	1	100	100	1	1	100	100
3.10.01.2.01.18	Program Penanggulangan Bencana	Urgensi Mitigasi bencana dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	12	-	12	12	12	12	100	100	12	12	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.3.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Awaliah Administrasi dan Sistem Pemerintahan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.02	Pembelian Cipta dan Tenaga ASN	Perilaku Bekerja Profesional Cipta dan Tenaga ASN	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.03	Kepuasan dan Pemenuhan Layanan Masyarakat Melalui 16070	Kelembagaan Layanan Masyarakat dan Ketahanan Masyarakat	Dokumen	1					100		100
2.16.01.3.01.04	Kelembagaan dan Pemenuhan Layanan Masyarakat Melalui 16070	Kelembagaan Layanan Masyarakat	Dokumen	6					100		100
2.16.01.3.01.05	Administrasi Ruang MM/ Ruang pada Perangkat Daerah	Kelembagaan SDO, Koordinasi, dan Administrasi	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.06	Kelembagaan Ruang MM/ Ruang pada SDO	Kelembagaan Ruang MM/ Ruang	%	100					100		100
2.16.01.3.01.07	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.08	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.09	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.10	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.11	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.12	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.13	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.14	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.15	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.16	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.17	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.18	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100
2.16.01.3.01.19	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	Bulan	12					100		100
2.16.01.3.01.20	Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Kelembagaan Kelembagaan	%	100					100		100

No	Tahun	Judul Penelitian	Penelitian	Metode	Tempat	Volume	Halaman	Referensi
1	2019	1	1	1	1	1	1	1
2	2020	2	2	2	2	2	2	2
3	2021	3	3	3	3	3	3	3
4	2022	4	4	4	4	4	4	4
5	2023	5	5	5	5	5	5	5
6	2024	6	6	6	6	6	6	6
7	2025	7	7	7	7	7	7	7
8	2026	8	8	8	8	8	8	8
9	2027	9	9	9	9	9	9	9
10	2028	10	10	10	10	10	10	10
11	2029	11	11	11	11	11	11	11
12	2030	12	12	12	12	12	12	12
13	2031	13	13	13	13	13	13	13
14	2032	14	14	14	14	14	14	14
15	2033	15	15	15	15	15	15	15
16	2034	16	16	16	16	16	16	16
17	2035	17	17	17	17	17	17	17
18	2036	18	18	18	18	18	18	18
19	2037	19	19	19	19	19	19	19
20	2038	20	20	20	20	20	20	20
21	2039	21	21	21	21	21	21	21
22	2040	22	22	22	22	22	22	22
23	2041	23	23	23	23	23	23	23
24	2042	24	24	24	24	24	24	24
25	2043	25	25	25	25	25	25	25
26	2044	26	26	26	26	26	26	26
27	2045	27	27	27	27	27	27	27
28	2046	28	28	28	28	28	28	28
29	2047	29	29	29	29	29	29	29
30	2048	30	30	30	30	30	30	30
31	2049	31	31	31	31	31	31	31
32	2050	32	32	32	32	32	32	32
33	2051	33	33	33	33	33	33	33
34	2052	34	34	34	34	34	34	34
35	2053	35	35	35	35	35	35	35
36	2054	36	36	36	36	36	36	36
37	2055	37	37	37	37	37	37	37
38	2056	38	38	38	38	38	38	38
39	2057	39	39	39	39	39	39	39
40	2058	40	40	40	40	40	40	40
41	2059	41	41	41	41	41	41	41
42	2060	42	42	42	42	42	42	42
43	2061	43	43	43	43	43	43	43
44	2062	44	44	44	44	44	44	44
45	2063	45	45	45	45	45	45	45
46	2064	46	46	46	46	46	46	46
47	2065	47	47	47	47	47	47	47
48	2066	48	48	48	48	48	48	48
49	2067	49	49	49	49	49	49	49
50	2068	50	50	50	50	50	50	50
51	2069	51	51	51	51	51	51	51
52	2070	52	52	52	52	52	52	52
53	2071	53	53	53	53	53	53	53
54	2072	54	54	54	54	54	54	54
55	2073	55	55	55	55	55	55	55
56	2074	56	56	56	56	56	56	56
57	2075	57	57	57	57	57	57	57
58	2076	58	58	58	58	58	58	58
59	2077	59	59	59	59	59	59	59
60	2078	60	60	60	60	60	60	60
61	2079	61	61	61	61	61	61	61
62	2080	62	62	62	62	62	62	62
63	2081	63	63	63	63	63	63	63
64	2082	64	64	64	64	64	64	64
65	2083	65	65	65	65	65	65	65
66	2084	66	66	66	66	66	66	66
67	2085	67	67	67	67	67	67	67
68	2086	68	68	68	68	68	68	68
69	2087	69	69	69	69	69	69	69
70	2088	70	70	70	70	70	70	70
71	2089	71	71	71	71	71	71	71
72	2090	72	72	72	72	72	72	72
73	2091	73	73	73	73	73	73	73
74	2092	74	74	74	74	74	74	74
75	2093	75	75	75	75	75	75	75
76	2094	76	76	76	76	76	76	76
77	2095	77	77	77	77	77	77	77
78	2096	78	78	78	78	78	78	78
79	2097	79	79	79	79	79	79	79
80	2098	80	80	80	80	80	80	80
81	2099	81	81	81	81	81	81	81
82	2100	82	82	82	82	82	82	82
83	2101	83	83	83	83	83	83	83
84	2102	84	84	84	84	84	84	84
85	2103	85	85	85	85	85	85	85
86	2104	86	86	86	86	86	86	86
87	2105	87	87	87	87	87	87	87
88	2106	88	88	88	88	88	88	88
89	2107	89	89	89	89	89	89	89
90	2108	90	90	90	90	90	90	90
91	2109	91	91	91	91	91	91	91
92	2110	92	92	92	92	92	92	92
93	2111	93	93	93	93	93	93	93
94	2112	94	94	94	94	94	94	94
95	2113	95	95	95	95	95	95	95
96	2114	96	96	96	96	96	96	96
97	2115	97	97	97	97	97	97	97
98	2116	98	98	98	98	98	98	98
99	2117	99	99	99	99	99	99	99
100	2118	100	100	100	100	100	100	100



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang bahwa tahapan kegiatan dalam penanggulangan bencana terdapat 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pra Bencana
2. Tanggap Darurat bencana, dan
3. Pasca Bencana

Sehingga dalam struktur tersebut terdapat 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi utama dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk lebih jelasnya maka bersama ini kami uraikan tentang pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kota Serang tahun 2020 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 bahwa lembaga yang menangani bencana secara nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa sebagai lembaga yang menangani bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan fungsi sebagai :

1. Pelaksanaan koordinasi
2. Pelaksanaan komando, dan
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang dilaksanakan secara komprehensif dalam arti mulai dari kondisi aman atau pra bencana yaitu dilaksanakannya kegiatan-kegiatan berupa pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat bencana sampai kepada pasca bencana yaitu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam keadaan kondisi aman BPBD Kota Serang melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang potensi bencana yang ada dikota Serang, pemantauan dan informasi potensi bencana alam dan pembekalan secara teknis cara penanggulangan bencana kepada relawan, pengadaan sembako sebagai buffer stock dalam rangka kesiapsiagaan bencana.



Dalam kondisi dimusim hujan, tentu BPBD Kota Serang selalu mengadakan monitoring baik langsung ke wilayah-wilayah yang rawan bencana banjir maupun monitoring melalui pesawat radio (HT) dan Hand Phone dengan menghubungi relawan-relawan yang ada di wilayah rawan bencana banjir. Dan apabila terjadi bencana seperti banjir di wilayah Kecamatan Kasemen, maka Tim penanggulangan bencana BPBD Kota Serang bersama TRC langsung menuju ketitik bencana untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti melakukan kaji cepat, evakuasi korban bencana, memberikan bantuan yang diperlukan korban bencana seperti sembako, family kit, obat-obatan, kebutuhan pakaian seperti selimut dan lainnya sesuai kemampuan buffer stock BPBD.

Dalam hal penanganan penanggulangan bencana di Kota Serang dalam perjalanannya masih banyak kekurangan terutama dalam hal sumber daya manusia, perlu diketahui bahwa legalitas personil berupa PNS di BPBD Kota Serang hanya 8 (delapan) orang termasuk kepala pelaksana, sehingga akan sulit dalam penanganan bencana se-kota Serang sesuai dengan harapan warga masyarakat yaitu penanganan yang cepat, tepat, terpadu, terarah.

Adapun tantangan dan peluang dalam pelayanan penanggulangan bencana BPBD Kota Serang adalah sbb :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1. Mudahnya akses koordinasi baik horizontal dengan OPD terkait maupun vertical dengan BPBD Provinsi dan BNPB



2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tak terduga APBD Kota Serang
3. Adanya komitmen pimpinan dalam penanggulangan bencana
4. Adanya regulasi penanggulangan bencana yang terstruktur.

b.Kelemahan

1. Masih kurangnya sumber daya manusia BPBD Kota Serang dalam penyelenggaraan bencana.
2. Belum adanya gedung kantor sendiri sebagai operasional perkantoran yang representative.
3. Belum optimalnya sinergitas pada saat pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana

Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Pesatnya perkembangan teknologi dalam menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana
2. Adanya peran serta relawan, ormas dan LSM dalam upaya penanggulangan
3. Adanya peluang peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana



b. Ancaman

1. Adanya perubahan iklim global yang menambah intensitas bencana alam di semua wilayah
2. Kompleknya potensi bencana alam, non alam dan bencana sosial di wilayah Kota Serang
3. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan
4. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
5. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di kota Serang

Secara eksternal telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini cuaca alam sudah tidak menentu ditambah kondisi hutan yang semakin gundul, RTH dan atau penghijauan berkurang, sarana prasarana wilayah perkotaan yang kurang/tidak tertata dengan baik, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan lunturnya filosofi gotong royong, sehingga bencana banjir terjadi dimana-mana, tentu harus adanya percepatan regulasi untuk menangani kondisi alam seperti itu.

Secara internal tentu harus adanya penguatan terhadap lembaga yang menangani bencana daerah terutama adanya sumber daya manusianya dan sarana dan prasarananya, sehingga sasaran dan strategi penanganan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik sesuai harapan masyarakat.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan seyogyanya berdasarkan kebutuhan bukan berangkat dari suatu keinginan, program dan kegiatan setiap OPD tentu harus tertuang dalam rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kota Serang dengan bersumber dari rancangan awal rencana kerja OPD, yang artinya seyogyanya rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan semestinya sama.

Proses pembuatan rencana kerja program dan kegiatan berawal dari suatu kebutuhan tugas pokok dan fungsi OPD secara komprehensif, mulai dari program dan kegiatan perkantoran sampai kepada program dan kegiatan teknis yang kemudian dikomparasi dengan kemampuan APBD Kota Serang. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 ini terdapat penataan program dan kegiatan dibanding tahun anggaran 2021 sebagai bentuk penguatan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Adapun sebagai gambaran jelasnya program dan kegiatan BPBD Kota Serang tahun anggaran 2022 tersajikan sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RPJPD TAHUN 2012
KOTA SERANG

REVISI RENCANA AWAL RPJPD

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	SARJANA AWAL RPJPD		MASE INDIKATOR	INDIKATOR	REVISI RENCANA AWAL RPJPD		MASE INDIKATOR	INDIKATOR
			INDIKATOR HASIL	TARGET LAPORAN			INDIKATOR HASIL	TARGET LAPORAN		
1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1
I	1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
			%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
2	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
II	1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
2	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
2	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
1	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain
2	Pelayanan Informasi Binaan Bercara Kabupaten/Kota	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Desain

	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	Jumlah rencana dalam program pelatihan kefarmasian	Tipe	Tingkat	Masa	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	Jumlah rencana dalam program pelatihan kefarmasian	Tipe	Masa
4	Program Keperawatan Komunitas untuk Peningkatan dan Ketersediaan	Rincian	66	0	Daerah	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	66	0	Daerah
5	Program Keperawatan Komunitas untuk Peningkatan dan Ketersediaan	Rincian	66	0	Daerah	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	66	0	Daerah
6	Program PISA Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	1	1	Regional	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	1	1	Regional
7	Pengembangan Keperawatan (Nurses Caput (NRC) Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	17	17	TBC	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	17	17	TBC
8	Pelaksanaan Promofarmasi dan Edukasi Kesehatan Binaan	Rincian	100	100	%	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	100	100	%
9	Rencana caput Binaan Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	17	17	TBC	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	17	17	TBC
10	Pemasaran, pendongkrak dan Edukasi Kesehatan Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	14	14	Bulan	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	14	14	Bulan
11	Peningkatan Logistik Penyelamatan dan Edukasi Binaan Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	100	100	Jalan	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	100	100	Jalan
12	Pemasaran Sistem Dasar Pranggolan Binaan	Rincian	100	100	%	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	100	100	%
13	Peningkatan Ruang Pranggolan Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	1	1	Dakam	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	1	1	Dakam
14	Pengadaan Keperawatan Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	4	4	Bulan	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	4	4	Bulan
15	Kerjasama antar lembaga dan Komite dalam Pranggolan Binaan Kabupaten / Kota	Rincian	1	1	Regional	Rincian	Perubahan Perencanaan Pelaksanaan dan Ketersediaan teknologi Binaan	Rincian	1	1	Regional

V	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Arahmandiri dibelanja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	RUB.000.000	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Intervensi dan pelaksanaan program dan kegiatan strategis	%	RUB.000.000
1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Madya Jumlah Dokumen Rencana Jumlah Dokumen RKUJ dan Prinsip-penerapan Kinerja Jumlah buku harmonisasi peraturan menteri SIPD pada SK/PPD	1 1 2 12	25.639.400	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Madya Jumlah Dokumen Rencana Jumlah Dokumen RKUJ dan Prinsip-penerapan Kinerja Jumlah buku harmonisasi peraturan menteri SIPD pada SK/PPD	1 1 2 12	25.639.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SK/PPD	Jumlah Dokumen RKA	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SK/PPD	Jumlah Dokumen RKA	1	2.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SK/PPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SK/PPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	2.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SK/PPD	Jumlah Dokumen DPA	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SK/PPD	Jumlah Dokumen DPA	1	2.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SK/PPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SK/PPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	2.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SK/PPD	Jumlah Dokumen LKJ-IP Jumlah Dokumen LPPD	1 1	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SK/PPD	Jumlah Dokumen LKJ-IP Jumlah Dokumen LPPD	1 1	3.250.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Bulanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD Jumlah Dokumen Profil dan Selang Peningkatan Perangkat Daerah	12 1 2	19.044.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Bulanan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD Jumlah Dokumen Profil dan Selang Peningkatan Perangkat Daerah	12 1 2	19.044.000
VI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Arifermilisa dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	/00	1.262.074.307	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Arifermilisa dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	/00	1.262.074.307
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.185.137.307	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.185.137.307

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunggulan Akbar Tahun SKPD	000	Jumlah Dokumen Laporan Keunggulan Akbar Tahun	1	Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunggulan Akbar Tahun SKPD	000	Jumlah Dokumen Laporan Keunggulan Akbar Tahun	1	Dokumen	2.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunggulan Bulanan/Trisulan/Semesteran	000	Jumlah Dokumen Laporan Keunggulan Bulanan/Trisulan/Semesteran	6	Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keunggulan Bulanan/Trisulan/Semesteran	000	Jumlah Dokumen Laporan Keunggulan Bulanan/Trisulan/Semesteran	6	Dokumen	12.000.000
		000	Koordinasi SKPD Keunggulan	12	Bulan							
VII	Administrasi Ruang MMB Daerah pada Prongplak Daerah	000	Pemetaan Koordinasi Dokumen Ruang MMB Daerah	100	%	21.400.000	Administrasi Ruang MMB Daerah pada Prongplak Daerah	000	Pemetaan Koordinasi Dokumen Ruang MMB Daerah	100	%	21.400.000
		000	Jumlah Dokumen Peligian Ruang MMB Daerah yang Daerah	12	Bulan	21.400.000	Pemetaan Ruang MMB Daerah pada SKPD	000	Jumlah Dokumen Peligian Ruang MMB Daerah yang Daerah	12	Bulan	21.400.000
VIII	Administrasi Keperawatan Prongplak Daerah	000	Pemeriksaan pengisian data pada prongplak	100	%	4.000.000	Administrasi Keperawatan Prongplak Daerah	000	Pemeriksaan pengisian data pada prongplak	100	%	4.000.000
		000	Jumlah pelatikan kelas ke-1 dan ke-2	1	Buln	4.000.000		000	Jumlah pelatikan kelas ke-1 dan ke-2	1	Buln	4.000.000
IX	Administrasi Dinas Prongplak Daerah	000	Pemeriksaan tingkat administrasi umum	100	%	213.500.000	Administrasi Dinas Prongplak Daerah	000	Pemeriksaan tingkat administrasi umum	100	%	213.500.000
		000	Pemeriksaan laporan ke-1 dan ke-2	1	Buln	213.500.000		000	Pemeriksaan laporan ke-1 dan ke-2	1	Buln	213.500.000
1	Penyediaan Kompleks Prondan Listrik/Pemanggis Bangunan Kantor	000	Jumlah buln penyediaan komplek prondan listrik/pemanggis bangunan kantor	12	Bulan	6.000.000	Penyediaan Kompleks Prondan Listrik/Pemanggis Bangunan Kantor	000	Jumlah buln penyediaan komplek prondan listrik/pemanggis bangunan kantor	12	Bulan	6.000.000
		000	Jumlah buln penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	6.000.000		000	Jumlah buln penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	6.000.000
1	Penyediaan Prondan Ruang Tangg	000	Jumlah Alat-alat Ruang Tangg	2	Unit		Penyediaan Prondan Ruang Tangg	000	Jumlah Alat-alat Ruang Tangg	2	Unit	
		000	Jumlah buln penyediaan kendaraan roda dua dan kendaraan Pegawai	12	Bulan	11.000.000		000	Jumlah buln penyediaan kendaraan roda dua dan kendaraan Pegawai	12	Bulan	11.000.000
2	Penyediaan Ruang Cerdikan dan Pengabdian	000	Jumlah buln penyediaan barang modal dan pengabdian	12	Bulan	21.400.000	Penyediaan Ruang Cerdikan dan Pengabdian	000	Jumlah buln penyediaan barang modal dan pengabdian	12	Bulan	21.400.000
		000										

						196.100.000		194.300.000	
Uraian	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan/pemutakhiran	12	Bulan		Bulan		12	Bulan	
000	Jumlah bulan penyediaan jasa operator website SKPD	12	Bulan		Bulan		12	Bulan	
000	Jumlah bulan penyediaan jasa operator SIPRABUMDES	12	Bulan		Bulan		12	Bulan	
000	Jumlah bulan penyediaan jasa operator RANDEC	12	Bulan		Bulan		12	Bulan	
000	Aksi kewarohan dan pemberitahuan	12	Bulan		Bulan		12	Bulan	
000	Jumlah event yang diikuti (Hut Kota Serang, MTQ & Maulid)	3	Event		Event		3	Event	
Pembinaan Ruang MMJ Daerah Penyelenggara Event Persektoratan Daerah						000.000.000	000	%	000.000.000
1. Penyediaan Jasa Persektoratan, Biaya Persektoratan, Pajak, dan Persektoratan Daerah Operasional atau Lapangan Persektoratan Mebel						000.300.000	12	Bulan	
Jumlah Bulan penyediaan rata-rata/bekala melebihi							12	Bulan	
Jumlah Persektoratan rata-rata/bekala perbulan gedung kantor						000.300.000	12	Bulan	
Jumlah gedung yang dipertanggungjawabkan							1	Unit	
Jumlah Persektoratan rata-rata/bekala perbulan/pengalokasian						000.300.000	12	Bulan	
2. Persektoratan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Jumlah Persektoratan rata-rata/bekala perbulan/pengalokasian									
3. Persektoratan Rehabilitasi Ruang dan Persektoratan Penyelenggara Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Jumlah Persektoratan rata-rata/bekala perbulan/pengalokasian									



2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan OPD bisa berasal dari 2 (dua) arah yaitu top down dan bottom up, program dan kegiatan yang berasal dari system top down itu karena OPD mengadakan program dan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari OPD itu sendiri dan biasanya kegiatan tersebut prosentasenya lebih besar namun mengarah pada kepentingan masyarakat. Disamping itu juga ada program dan kegiatan dengan system bottom up yaitu hasil usulan masyarakat melalui musbangkel kemudian ditindaklanjuti dengan musrembang tingkat kecamatan dan musrembang tingkat kota, namun tetap didasarkan pada tugas pokok dan fungsi OPD tertentu.

Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang juga mengakomodir setiap usulan dan kebutuhan dari masyarakat, terlepas melalui musrembang maupun hasil monitoring lapangan Tim BPBD. Dari usulan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan sembako ketika tanggap darurat bencana terjadi, sehingga korban bencana akan kebutuhan dasar dipenampungan sementara terpenuhi dan adanya pelatihan serta sosialisasi mengenai penanggulangan kebencanaan, yang diharapkan bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana .



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan BNPB tahun 2015-2020 adalah hasil dari identifikasi dan kajian atas Sembilan agenda prioritas RPJMN yaitu prioritas dalam perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disebut NAWA CITA. Berkaitan dengan penanggulangan bencana secara implisit tersirat pada nawa cita yang pertama dan ketujuh yaitu :

- 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.**
- 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.**

Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dilakukan *untuk melindungi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang beresiko tinggi*. Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipasif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana dimasa datang. Sehubungan dengan itu, arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2020 diarahkan untuk mengurangi



resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2020 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2020 salah satunya adalah *Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim*. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelayanan penanggulangan bencana



2. Meningkatkan kinerja aparaturnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara profesional
3. Meningkatkan mutu pelayanan petugas dan relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu.
4. Adanya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

SASARAN

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun 2022 adalah sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang terutama para pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana peraturan daerah Kota Serang nomor 12 tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Para pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang harus mampu menjabarkan tugas dan fungsinya serta melaksanakannya secara profesional dilapangan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai serta anggota/pelaksana yang handal dan trampil.

3.3. Program dan kegiatan

Banyak faktor dan pertimbangan yang mempengaruhi dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 di



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, diantaranya adalah :

1. Penataan dan penguatan dalam bidang sekretariat BPBD
2. Penguatan dalam bidang sumber daya manusia
3. Penguatan informasi dan teknis penanggulangan bencana bagi aparaturnya dan relawan penanggulangan bencana
4. Penguatan penanggulangan bencana secara komprehensif mulai dari pra bencana sampai kepada pasca bencana.

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tahun anggaran 2022 berdasarkan perencanaan awal terdiri dari 12 (lima belas) Kegiatan dengan 55 (lima puluh lima) kegiatan adalah sebagai berikut :



BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output rencana kerja BPBD Kota Serang adalah program tahunan BPBD kota Serang yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program BPBD kota Serang. Rencana kerja BPBD kota Serang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD kota Serang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD kota Serang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Rencana Kerja (Renja) BPBD tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat BPBD kota Serang selama kurun waktu satu tahun. Rencana kerja BPBD disamping untuk penyusunan rencana kerja jangka pendek kota Serang juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) BPBD tahun 2022.



Adapun fungsi dari renja tahun 2022 ini sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2021 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian rencana kerja (Renja) BPBD tahun 2022 ini kami susun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 .

Serang, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SERANG



DIAT HERMAWAN, S.ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19760426 200112 1 002

No	Uraian Kegiatan	Durasi	Titik Koordinat	Kelembaban	Suhu Udara	Kelembaban Relatif	Ketinggian	Salinitas	Pada Waktu Pengamatan	Keterangan	Waktu Pengamatan	Waktu Pengamatan
1	Pengukuran suhu permukaan laut, kedalaman 0,5m dan 1m, serta salinitas dan suhu air permukaan laut di lokasi pengamatan	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
2	Pengamatan kondisi perairan sekitar lokasi pengamatan	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
3	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
4	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
5	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
6	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
7	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
8	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
9	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
10	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
11	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
12	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
13	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
14	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
15	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
16	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
17	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
18	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
19	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
20	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
21	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
22	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
23	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
24	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
25	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
26	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
27	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
28	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
29	Pengamatan suhu permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					
30	Pengamatan salinitas permukaan laut dan kedalaman 0,5m dan 1m	01	101.238	0	31.10000	78	1.000					

1	00	01	2.00	00	Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Bina-Bangunan	Pembinaan dan Pemeliharaan Bina-Bangunan	Saluran Pengaliran Air Bersih	%	0073 0000000	000	000.000.000	100	000.000.000
1	00	01	2.01	01	Bangunan Gedung Berlandas Tetap	Bangunan Gedung Berlandas Tetap	Bangunan Gedung Berlandas Tetap	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
2	00	01	2.02	01	Bangunan Gedung Berlandas Tidak Tetap	Bangunan Gedung Berlandas Tidak Tetap	Bangunan Gedung Berlandas Tidak Tetap	%	0073 0000000	000	200.000.000	100	200.000.000
3	00	01	2.03	01	Bangunan Gedung Tidak Berlandas	Bangunan Gedung Tidak Berlandas	Bangunan Gedung Tidak Berlandas	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
4	00	01	2.04	01	Bangunan Gedung Berlandas dan Tidak Berlandas	Bangunan Gedung Berlandas dan Tidak Berlandas	Bangunan Gedung Berlandas dan Tidak Berlandas	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
5	00	01	2.05	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
6	00	01	2.06	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
7	00	01	2.07	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
8	00	01	2.08	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
9	00	01	2.09	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000
10	00	01	2.10	01	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung	%	0073 0000000	000	400.000.000	100	400.000.000

